

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Desa Tarai Bangun

##### 1. Sejarah Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, menurut sejarah berdirinya adalah melalui pemekaran dari desa induk yaitu desa Kualu. Pada awalnya desa Tarai Bangun merupakan wilayah kedusunan yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Dusun IV Tarai dan Dusun V Rawa Bangun. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan desa Tarai Bangun. Semula tidaklah mudah untuk menyatukan Visi, Misi dan persepsi dalam rangka membentuk sebuah desa yang definitif, berbagai Aral melintang, konsekuensi dan tantangan seakan menjadi pengalaman dalam perjalanan waktu.

Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya, akhirnya pada tahun 2002 lahir sebuah desa (Persiapan) Tarai Bangun ditunjuk seorang pejabat sementara Kepala Desa (Pjs) yaitu Bapak Zainur, hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala Desa Definitif oleh Bapak Bupati Kampar pada tahun 2004. Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahun (2002-2006) : Zainur
2. Tahun (2006-2007) : Tahzan Alfajri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 3. Tahun (2007-2007)          | : Eka Putra          |
| 4. Tahun (2007-2008)          | : Mudahir            |
| 5. Tahun (2008-2014)          | : Drs. H. Kamiruddin |
| 6. Tahun (Jan 2014-Juli 2014) | : Rakhmat. S. Sos    |
| 7. Tahun (Juli 2014-Okt 2015) | : Andra Maistar      |
| 8. Tahun (Okt 2015-sekarang)  | : Eka Putra          |

**2. Demografi**

**a) Batas wilayah Desa**

Desa Tarai Bangun terletak didalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau berbatasan dengan:

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Sebelah Utara   | : Kelurahan Tuah Karya          |
| 2) Sebelah Selatan | : Desa Kualu                    |
| 3) Sebelah Barat   | : Kelurahan Tuah Karya          |
| 4) Sebelah Timur   | : Desa Kualu/Desa Rimbo Panjang |

**b) Luas wilayah Desa Tarai Bangun**

- |                |          |
|----------------|----------|
| 1. Pemukiman   | : 52 ha  |
| 2. Perkebunan  | : 36 ha  |
| 3. Perkantoran | : 0.5 ha |
| 4. Sekolah     | : 10 ha  |
| 5. Jalan       | : 40 ha  |

**3. Keadaan Sosial**

Desa Tarai Bangun mempunyai jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga 6080 KK, yang terdiri dari Laki-laki: 11.996 jiwa, perempuan : 11.350 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1**  
**Jumlah Penduduk**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	11.996	51.39%
2	Perempuan	11.350	48.61%
<b>Jumlah</b>		<b>23.346</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : Kantor Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tahun 2016*

Pendidikan merupakan peran yang sangat penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Masyarakat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang sangat mengutamakan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga kejenjang yang lebih tinggi seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel II.2**  
**Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD/MI	1.752	15.72%
SLTP/MTS	2.536	22.76%
SLTA/MA	5.915	53.09%
S1/Diploma	940	8.43%
<b>Jumlah</b>	<b>11.143</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tahun 2016*

Kepercayaan masyarakat di desa Tarai Bangun seluruhnya beragama Islam, sedangkan yang beragama non Islam hanya sebagian kecil masyarakat pendatang, seperti transmigran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.3**  
**Kepercayaan**

Agama	Jumlah	Persentase
Islam	18.316	93.77%
Hindu	-	-
Budha	21	0.11%
Kristen Khatolik	167	0.85%
Kristen Protestan	1.030	5.27%
<b>Jumlah</b>	<b>19.534</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tahun 2016*

Masyarakat di Desa Tarai Bangun sebagian besar adalah sebagai petani, dan juga sebagai pedagang, dan pekerjaan lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.4**  
**Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah (KK)	Persentase
Petani	185	38.06%
Pedagang	90	18.52%
Buruh	80	16.46%
PNS	74	15.23%
Wiraswasta	57	11.73%
<b>Jumlah</b>	<b>486</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tahun 2016*

#### 4. Keadaan Ekonomi

Kondisi masyarakat Desa Tarai Bangun bermata pencaharian tidak tetap, sebagian ada petani, pedagang, buruh harian dan sawit dengan penghasilan rata-rata dari Rp 1.500.000,- perbulan. Selain sektor non formal, masyarakat Desa Tarai Bangun sebagian disektor formal seperti PNS, Buruh, Guru, Wiraswasta dan lain-lain.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang**

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang ini, mulai beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun kegiatan yang dilakukan semuanya merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah diatur langsung dari PNPM-Mandiri Perdesaan Pusat. Bentuk program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan simpan pinjam khusus perempuan.

### **1. Visi dan Misi PNPM-Mandiri Perdesaan**

#### **a. Visi PNPM-Mandiri Perdesaan**

Adapun visi dari PNPM-Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Adapun maksud dari visi ini adalah : kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

#### **b. Misi PNPM-Mandiri Perdesaan**

Adapun misi dari PNPM-Mandiri Perdesaan ;

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka visi dan misi PNPM-Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa<sup>16</sup>.

2. Tujuan PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang

a. Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau pelestarian pembangunan
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya local
- 3) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 4) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
- 5) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

<sup>16</sup> Dokumentasi PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip dasar PNPM-Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM-Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok, yaitu terdiri dari:

a. Bertumpu pada pembangunan Manusia

Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada fisik semata

b. Otonomi

Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi dari luar

c. Transparan dan Akuntabilitas

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administrative.

d. Keberpihakan pada orang/masyarakat miskin

Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

e. Kolaborasi

Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prosedur Pemberian Pinjaman

Setiap kelompok berkewajiban membuat proposal dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan kredit
- b. Daftar anggota pemanfaat/KTP atau KK
- c. Rencana angsuran kelompok dan anggota
- d. Foto copy buku rekening tabungan kelompok
- e. Rencana Usaha Bersama/RUA dan RKK
- f. Surat keterangan usaha dari Desa
- g. Foto copy kartu kredit yang telah lunas bagi kelompok lama
- h. Profil kelompok
- i. Surat persetujuan ahli waris<sup>17</sup>

5. Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran SPP PNPM-MP

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Mendagri 414.2/PMD/2004 tentang Pelaksanaan Petunjuk

Teknis Operasional Program PNPM Mandiri Perdesaan<sup>18</sup>

6. Struktur Organisasi PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang

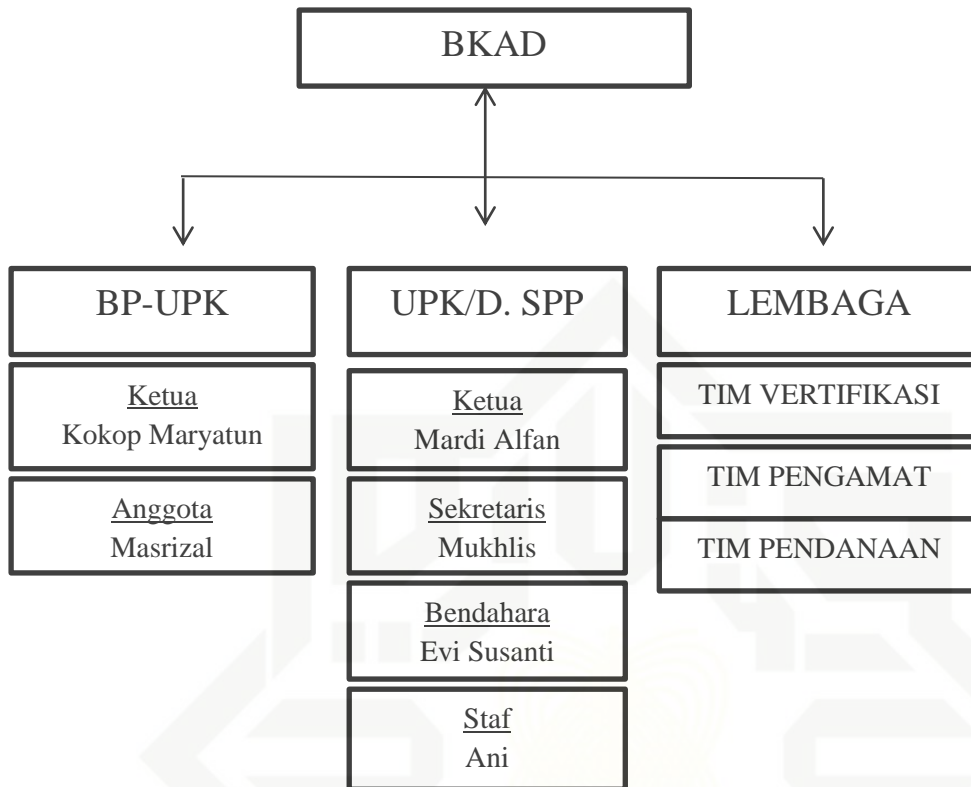
<sup>17</sup> Aturan Kelembagaan BKAD, Standar Prosedur dan Operasional (SPO) Perguliran Dana SPP PNPM-Mandiri Perdesaan, h. 3

<sup>18</sup> Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran SPP PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 7. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

#### a. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau lebih beberapa desa disuatu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengimbangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan sebagai pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja Unit Pengelola Kegiatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan. Badan Pengawas Unit Pengelolaan Kegiatan dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota.

BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang dilakukan oleh Musyawarah Antar Desa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)<sup>19</sup>.

c. Tim Vertifikasi (TV)

Tim vertifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, dibidang sarana prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelestarian keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan.

Peran Tim Vertifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM-Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada masyarakat antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Tim Vertifikasi menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dan Musyawarah Antar Desa/ Badan Kerjasama Antar Desa<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Aturan Kelembagaan BKAD. *Standar Prosedur Dan Operasional (SPO)*- Badan Pengawas Unit Pengelolaan Kegiatan (BP-UPK)

<sup>20</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tim Pengamat

Tim Pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa, serta memberikan masukan dan saran agar Musyawarah Antar Desa dapat berlangsung secara partisipatif.

e. Tim Pendanaan

Tim Pendanaan sebagai organisasi yang otonom dibawah BKAD harus memiliki SOP (yang disetujui dan ditetapkan MAD) yang mengatur seluruh aspek dan mekanisme kerja organisasi.

Tim Pendanaan secara profesional bekerja sebagai mitra dan berdampingan dengan UPK. Tim Pendanaan Kegiatan harus dapat memastikan bahwa seluruh pendanaan yang dilakukan oleh UPK sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan BKAD melalui MAD. Kompetensi dan kemampuan Tim Pendanaan Kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, dapat bersikap independen, tektis dan konsisten<sup>21</sup>.

f. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar

<sup>21</sup> Aturan Kelembagaan BKAD. *Standar Prosedur Dan Operasional (SPO)*-Tim Pendanaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. UPK mendapat penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

1) Ketua UPK

- a. Memimpin rapat atau pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait
- b. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan ke Bank, pembukaan rekening, pencairan ke Desa. Kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, dan dana pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- c. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris, maupun bendahara.

2) Sekretaris UPK

- a. Bertanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan
- b. Menempelkan dan memberi informasi tentang petanggung jawaban keuangan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi.
- c. Mencatat informasi dan hasil keputusan rapat.
- d. Bertindak sebagai humas apabila ketua UPK berhalangan
- e. Merencanakan pengadaan administrasi kantor dan membuat surat yang diperlukan untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Bendahara UPK

Adapun tugas-tugas dari Bendahara UPK ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat setiap transaksi keuangan
- b. Membuat laporan keuangan
- c. Memegang dan menyimpan semua rekening dana PNPM Mandiri Perdesaan.
- d. Mengisi form-form keuangan<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Aturan Kelembagaan BKAD. *Standar Prosedur Dan Operasional (SPO)*. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)